

**LEGAL STANDING BAGI WARGA NEGARA ASING  
SEBAGAI PEMOHON PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
DI DEPAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
BERDASARKAN ASAS NATIONAL TREATMENT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Satya Wacana**

**Lidya Aghasty Bethania Wongkar  
NIM: 312011036**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
SALATIGA  
Mei 2016**



## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LIDYA AGHASTY BETHANIA WONGKAR

NIM : 312011036

Email : lidyawongkar1@gmail.com

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul tugas akhir : LEGAL STANDING BAGI WARGA NEGARA ASING SEBAGAI PEMOHON  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI DEPAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN ASAS NATIONAL TREATMENT

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif*\* kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- ☒ a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- ☐ b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA\*\*

\* Hak yang tidak terbatas hanya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.

\*\* Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 6 Juni 2016

Lidya Aghasty Bethania Wongkar

Mengetahui,

Dr. Titon Slamet Kurnia, S.H., M.H.





## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LIDYA AGHASTY BETHANIA WONGKAR

NIM : 312011036

Email : lidyawongkar1@gmail.com

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul tugas akhir : LEGAL STANDING BAGI WARGA NEGARA ASING SEBAGAI PEMOHON  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI DEPAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN ASAS NATIONAL TREATMENT

Pembimbing : Dr. Titon Slamet Kurnia, S.H., M.H.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 6 Juni 2016



Lidya Aghasty Bethania Wongkar



**Lembar Persetujuan**

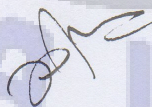
**LEGAL STANDING BAGI WARGA NEGARA ASING  
SEBAGAI PEMOHON PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
DI DEPAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
BERDASARKAN ASAS NATIONAL TREATMENT**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**  
**Universitas Kristen Satya Wacana**

**Lidya Aghasty Bethania Wongkar**  
**NIM: 312011036**

**Pembimbing**



**Dr. Titon Slamet Kurnia, S.H., M.H.**

**Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga**  
**Mei 2016**



**Lembar Pengujian**

**Komisi Penguji**


**Penguji I**

  
**Jefferson Kameo, S.H., LL.M.**

**Penguji II**

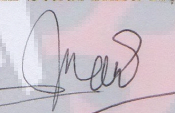
  
**Dr. Titon Slamet Kurnia S.H., M.H.**

**Penguji III**

  
**Arie Siswanto, S.H., M.Hum**

**Diuji pada tanggal 30 Mei 2016**

**Mengesahkan,  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum**

  
**Dr. Christina Maya Indah, S.H., M.Hum**

**1956**



## Lembar Pernyataan Orisinalitas Skripsi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lidya Aghasty Bethania Wongkar  
NIM : 312011036  
Judul Skripsi : *Legal Standing* bagi Warga Negara Asing sebagai  
Pemohon Pengujian Undang-Undang di Depan  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Berdasarkan Asas *National Treatment*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai  
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila  
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Salatiga, 19 Mei 2016



Lidya Aghasty Bethania Wongkar

1956



## **Moto**

*It does not matter how slowly you go  
as long as you do not stop.*

**- Confucius -**



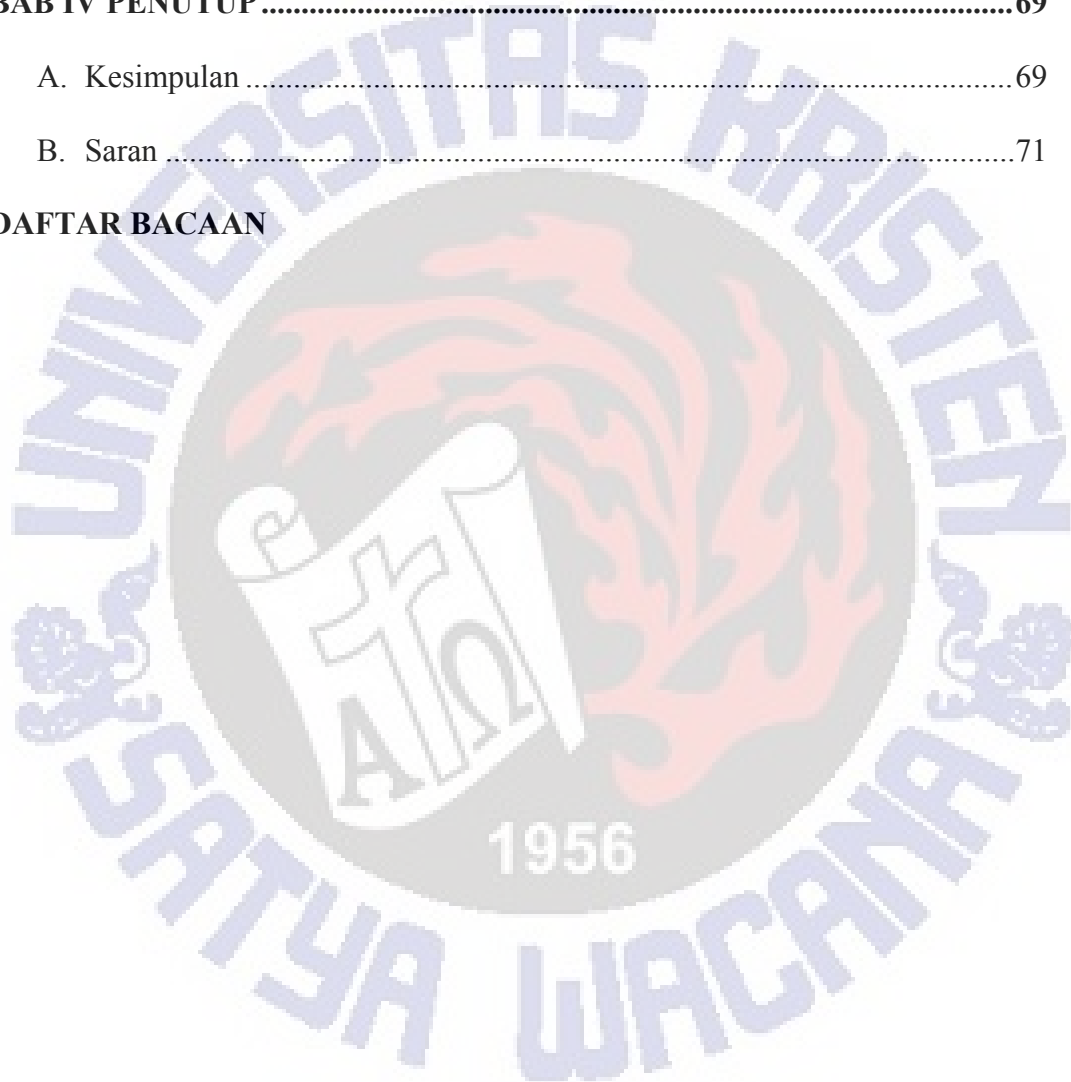


## DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH .....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR PERATURAN/KASUS .....	vii
ABSTRAK .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II NATIONAL TREATMENT SEBAGAI PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL.....</b>	<b>9</b>
A. Standar Perlakuan terhadap Warga Negara Asing.....	10
1. Negara Maju dan Negara Berkembang.....	10
2. <i>National Treatment</i> menurut Ajaran Carlos Calvo.....	22
B. Prinsip <i>National Treatment</i> dalam <i>World Trade Law</i> .....	22
1. Pengertian Prinsip <i>National Treatment</i> dalam GATT.....	24
2. Pengertian Prinsip <i>National Treatment</i> dalam TRIMs, TRIPs, dan GATS .....	31
C. Hakikat <i>National Treatment</i> sebagai Prinsip Hukum Internasional .....	38
<b>BAB III ASAS NATIONAL TREATMENT SEBAGAI DASAR LEGAL STANDING WNA.....</b>	<b>47</b>
A. Interpretasi MKRI terhadap Pasal 51 Ayat (1) Huruf a UU MKRI dalam Putusan MKRI No. 2-3/PUU-V/2007 .....	48



B. Interpretasi Ekstensif terhadap Pasal 51 Ayat (1) Huruf a UU MKRI berdasarkan Asas <i>National Treatment</i> .....	51
1. Tentang Kaidah <i>Legal Standing</i> Pemohon .....	51
2. Asas <i>National Treatment</i> untuk <i>Legal Standing</i> Pemohon WNA .....	55
C. Indonesia, MKRI, dan Resiko <i>Denial of Justice</i> .....	62
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR BACAAN</b>	





## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagai Pribadi yang telah menjadi sumber dukungan dan kekuatan terbesar, yang selalu memberi kemampuan kepada Penulis sehingga karena kasih dan penyertaan-Nya dalam hal ini Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “LEGAL STANDING BAGI WARGA NEGARA ASING SEBAGAI PEMOHON PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI DEPAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN ASAS NATIONAL TREATMENT.” Adapun skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua dari Penulis, Bapak Arnold Wongkar dan Ibu Hana Christina Laihad. Terima kasih atas dukungan yang tidak ternilai yang telah dicurahkan kepada Penulis, atas doa yang tidak pernah berhenti diucapkan juga kerja keras yang selama ini dilakukan hingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan studi ini. Doakanlah agar, meskipun dalam segala keterbatasan, Penulis dapat memberikan kebanggaan sebagai bentuk balas budi dari seorang anak kepada orang tua, walaupun hal tersebut tetap tidak akan sebanding dengan apa yang telah dan akan selalu diberikan tanpa henti kepada Penulis.
2. Adik-adik Penulis, Jeconiah Michaela Artemisia Wongkar, Evan Alphie Wongkar, dan Hizkia Daniel Klaudius Wongkar. Terima kasih atas

kesabaran dan pengertiannya selama ini sebagai bentuk dukungan agar Penulis dapat segera menyelesaikan studi ini.

3. Seluruh keluarga Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Penulis sangat bersyukur atas dukungan baik moral maupun materiil yang telah diberikan. terselesaikannya skripsi ini juga dilatarbelakangi oleh peran yang sangat besar dari keluarga Penulis.
4. Bapak Dr. Titon Slamet Kurnia, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulisan skripsi ini. Dengan kerendahan hati Penulis sangat berterima kasih kepada beliau yang sudah sangat sabar dalam membimbing Penulis.
5. Bapak Arie Siswanto, S.H., M.Hum dan Bapak Jefferson Kameo, S.H., LL.M., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik serta berbagai masukan bagi pembenahan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum UKSW, Ibu Dr. Christina Maya Indah, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum – Ilmu Hukum UKSW, Bapak Theofransus Litaay, S.H., LL.M, Ph.D selaku wali studi Penulis yang telah banyak memberikan arahan kepada Penulis, serta kepada seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum UKSW yang telah banyak berbagi ilmu pengetahuan selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum UKSW.
7. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum UKSW, terutama Mas Andrias N. Utama, S.E., yang sudah sangat banyak membantu Penulis baik dalam bidang administrasi maupun dalam segala bentuk kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.



8. Sahabat terdekat Penulis, Frista Rizky Massie yang selama ini selalu mendukung Penulis, memberi semangat, menjadi tempat berbagi kesenangan maupun keluh kesah Penulis, terutama pada proses penyelesaian skripsi.
9. Seluruh sahabat Penulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Marcel Emanuel L. Tambariki, Ilonna Ayu Larasaty, Oktatikasari Prasetyaningrum yang selama ini sudah saling mendukung satu sama lain.
10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana angkatan 2011 yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu.
11. Seluruh teman-teman Penulis dari tim Basket Fakultas Hukum (*Iustitia Basketballers*), tim Basket Magister UKSW, serta tim Basket UKSW Pekan Olahraga Mahasiswa Rayon 2015 yang juga turut memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis.
12. Serta seluruh pihak yang selama ini sudah turut membantu, mendoakan, memberikan dukungan, dorongan/ motivasi, semangat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam sepengetahuan penulis atau pun tidak.

Adapun Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Dengan ini, Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Karenanya, Penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaannya. Penulis berharap, dengan segala kekurangan yang ada pada skripsi ini, kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang membutuhkan. Tuhan memberkati.

## KATA PENGANTAR

Skripsi yang berjudul “*Legal Standing* bagi Warga Negara Asing sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang di Depan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Berdasarkan Asas *National Treatment*” merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang disusun oleh Penulis sebagai maksud untuk mengemukakan pendapat Penulis mengenai permasalahan apakah asas *national treatment* dalam hukum internasional dapat menjadi dasar *legal standing* warga negara asing (WNA) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), meskipun pada saat yang bersamaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MKRI) membatasi *legal standing* hanya untuk warga negara Indonesia (WNI).

Di dalam praktik internasional, penyebutan-penyebutan *national treatment* secara eksplisit pada dasarnya lebih banyak ditemui atau dikenal sebagai prinsip yang berasal dari ahli hukum dan diplomat Argentina, Carlos Calvo. Terlebih lagi di dalam hukum perdagangan dunia karena pada perkembangannya, *national treatment* telah ditetapkan sebagai prinsip di dalam hukum perdagangan dunia yang dinaungi oleh WTO. Bahkan menjadi salah satu prinsip sentral karena tercantum hampir di semua bidang inti perjanjian WTO, seperti GATT, GATS, TRIPs, dan TRIMs.

Tetapi, meskipun *national treatment* telah berkembang dari rezim hukum yang berbeda-beda pada hakikatnya hal tersebut mengambil manfaat dari prinsip hukum internasional yang mengatur tentang perlakuan terhadap orang asing, yang mana mengatakan bahwa dalam hal suatu negara bersedia menerima keberadaan WNA masuk ke dalam wilayahnya, maka WNA tersebut harus diperlakukan sama seperti warga negaranya sendiri, kecuali pada hal-hal tertentu yang menyangkut hak-hak warga negara yang eksklusif, seperti misalnya hak-hak politik, dimana WNA tidak bisa turut serta dalam suatu pemilihan umum, turut serta dalam pemerintahan, turut serta dalam pertahanan negara, memiliki hak atas tanah, dll. Inilah prinsip hukum internasional tersebut yang merupakan asas *national treatment*.

Adapun bentuk perlindungan dari hukum internasional bagi WNA di dalam sebuah negara yang mengalami kerugian terhadap hak-haknya karena tidak diperlakukan sama seperti warga negara, yaitu dengan perlindungan diplomatik, yang didasari pada prinsip dimana setiap negara berkewajiban untuk melindungi warganya



dan berhak menuntut negara lain yang telah merugikan hak-hak warganya di negara tersebut.

Dalam kaitannya pada hal tersebut, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Putusan MKRI No. 2-3/PUU-V/2007), terdapat para Pemohon WNA yang permohonannya oleh MKRI diputuskan tidak diterima karena dianggap tidak memiliki *legal standing* sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MKRI bahwa hanya WNI saja yang dapat memiliki *legal standing*. Padahal, pada saat yang bersamaan para Pemohon WNA tersebut sedang berupaya untuk mempertahankan haknya yang sangat fundamental, yaitu hak untuk hidup (*right to life*) yang telah dirugikan selagi keberadaannya di Indonesia.

Penulis berpendapat bahwa ketika permohonan pengujian konstiusionalitas undang-undang di MKRI melibatkan WNA sebagai pemohon, maka dalam hal tersebut kasusnya adalah kasuistik. Artinya, MKRI harus melihat terlebih dahulu bagaimana substansi permohonannya. Jika yang dipersoalkan oleh para pemohon WNA adalah tidak menyangkut hak eksklusif WNI, maka seharusnya dalam hal-hal tersebut MKRI perlu untuk menggunakan asas *national treatment* sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan WNA *legal standing* untuk bertindak sebagai pemohon pengujian konstiusionalitas undang-undang di MKRI. Disamping itu, Pada hakikatnya, secara substansial, Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MKRI memiliki makna bahwa diutamakannya pemohon WNI adalah karena hak konstiusional yang dilindungi adalah *citizen rights*. Oleh karena itu, secara ekstensif, jika yang dilindungi dalam konstitusi adalah hak asasi manusia, maka setiap orang, dapat, seyogianya, bertindak sebagai pemohon pengujian konstiusionalitas undang-undang, termasuk WNA. Karena hak asasi manusia tidak mengenal pembedaan berdasarkan status kewarganegaraan. Disamping itu, MKRI seharusnya tetap dapat menggunakan asas *national treatment* yang adalah hukum internasional tersebut, meskipun asas *national treatment* tersebut belum ditransformasikan menjadi hukum positif di negara Indonesia. Dalam hal ini, untuk menggunakan asas *national treatment* yang adalah hukum internasional tersebut, maka MKRI dapat melakukannya dengan melalui teknik inkorporasi. Berdasarkan hal ini, Penulis berpendapat bahwa seharusnya asas



*national treatment* berlaku sebagai dasar *legal standing* bagi para Pemohon WNA dalam Perkara No. 2-3/PUU-V/2007.

Dalam keadaan apabila MKRI menolak untuk menggunakan asas *national treatment* sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan akses bagi WNA melakukan upaya hukum di MKRI, maka implikasinya adalah negara Indonesia dalam hal ini beresiko menghadapi kasus *denial of justice*. Karena dengan ditutupnya akses tersebut, negara dianggap telah menutup kesempatan bagi WNA untuk dapat menempuh setiap upaya hukum efektif yang tersedia dalam upayanya untuk melindungi atau mempertahankan haknya yang telah dirugikan. Apabila hal ini terjadi, maka dengan terjadinya *denial of justice* tersebut, negara kebangsaan dari WNA tersebut berhak untuk campur tangan terhadap kasus warganya, dimana dengan hal tersebut Indonesia dalam hal ini kemungkinan dapat diminta bertanggung jawab oleh negara kebangsaan dari WNA tersebut.

Salatiga, 19 Mei 2016

Lidya Aghasty Bethania Wongkar



## DAFTAR PERATURAN/KASUS

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

*General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), 1994.

*General Agreement on Trade in Services* (GATS).

*Agreement on Trade-Related Investment Measures* (TRIMs).

*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1782K/Pid/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-III/2005 tentang  
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  
Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang  
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

*Attorney-General for Canada v. Cain* (1906).

*L.F.H. Neer and Pauline Neer (U.S.A) v. United Mexican States* (1926).

*North American Dredging Company of Texas (United States) v. Mexico* (1926).

*El Oro Mining and Railway Company (ltd) (Great Britain) v. Mexico* (1931).

Putusan *Bundesverfassungsgericht* Jerman, 22 Mei 2006.

*Administration of the Foreign Investment, Canada*.

*Alcoholic Beverages, Japan*.

*Greece v. United Kingdom, Ambatielos Arbitration.*

*Switzerland v. United States.*





## ABSTRAK

Asas *national treatment* merupakan prinsip di dalam hukum kebiasaan internasional yang mengatur tentang perlakuan terhadap orang asing di dalam sebuah negara. Prinsip ini mengatakan bahwa ketika negara bersedia menerima warga negara asing (WNA) masuk ke dalam wilayahnya, maka WNA tersebut harus diperlakukan sama seperti warga negara sendiri. Tetapi, bukan berarti diperlakukan sama dalam semua hal. Pada hal-hal tertentu pembedaan perlakuan kepada WNA tidak dilarang oleh hukum internasional, yaitu ketika menyangkut hak-hak warga negara yang eksklusif. Adanya asas *national treatment* ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh MKRI sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan WNA *legal standing* untuk bertindak sebagai pemohon pengujian konstusionalitas undang-undang. Dan untuk menggunakan asas *national treatment* yang adalah *international law* tersebut dapat dilakukan MKRI dengan teknik inkorporasi, dimana asas *national treatment* tersebut bisa langsung digunakan oleh MKRI meskipun tidak ditransformasikan menjadi hukum positif di Indonesia. Apabila asas *national treatment* tidak bisa dimanfaatkan sebagai dasar *legal standing* WNA, maka dalam hal ini Indonesia beresiko menghadapi kasus *denial of justice* yang mana dapat memicu timbulnya implikasi yuridis berkenaan dengan isu tanggung jawab internasional dimana Indonesia kemungkinan dapat diminta bertanggung jawab oleh negara kebangsaan dari WNA yang haknya telah dirugikan selagi keberadaannya di Indonesia.

Kata kunci: Asas *national treatment*, prinsip hukum kebiasaan internasional, WNA, MKRI, *legal standing*, teknik inkorporasi, *denial of justice*, tanggung jawab internasional.

